

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan elemen penting dalam menunjukkan kekuatan dan stabilitas suatu perusahaan. Penyusunan laporan keuangan yang akurat dan relevan sangat diperlukan agar pengelolaan perusahaan dapat berjalan dengan baik serta memberikan informasi yang jelas bagi berbagai pihak, termasuk manajemen, investor, dan regulator (Didi Setyono et al., 2023). Laporan keuangan yang baik harus memenuhi prinsip transparansi, akurasi, relevansi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Dengan adanya laporan yang kredibel, perusahaan dapat membangun kepercayaan dari *shareholder* maupun *stakeholder* serta menarik lebih banyak investasi.

Di sisi lain, manajemen yang baik memiliki peran penting dalam memastikan laporan keuangan disusun secara jujur dan akurat. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), sistem pengendalian internal yang ketat, serta kepatuhan terhadap regulasi merupakan faktor utama dalam menjaga integritas laporan keuangan. Namun, dalam praktiknya, terdapat tekanan bagi manajemen untuk menampilkan kinerja perusahaan yang optimal dan menarik di mata publik. Hal ini sering kali mendorong adanya kecurangan dalam laporan keuangan, baik melalui manipulasi pendapatan, menyembunyikan kewajiban, maupun penggelembungan aset. Kecurangan semacam ini dapat memberikan

gambaran keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang pada akhirnya berisiko merugikan perusahaan serta pemangku kepentingannya.

Menurut Survei Fraud Indonesia (2019), fraud atau kecurangan merupakan tindakan penipuan yang dilakukan dengan sengaja oleh beberapa pihak untuk menutupi kesalahan dengan memanipulasi laporan keuangan. Hal ini dapat merugikan pihak-pihak berkepentingan demi keuntungan pribadi. Survei ACFE di tahun 2019 menunjukkan bahwa di Indonesia, korupsi merupakan jenis fraud yang paling merugikan, dengan 69,9% responden (167 orang) menyatakannya, disusul penyalahgunaan aset (20,9% dari 50 responden) dan kecurangan laporan keuangan (9,2% dari 22 responden) dengan total kerugian sebesar Rp. 242.260.000.000.

Temuan ini menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan sangatlah merugikan bagi beberapa pihak. Menurut survei yang diterbitkan oleh Survei Fraud Indonesia (2022), Indonesia berada di peringkat ke-4 sebagai Negara dengan jumlah *fraud* di tahun 2022, tercatat sebanyak 23 kasus. Fraud terbesar di Indonesia adalah korupsi 64%, penyalahgunaan aset/kekayaan negara & perusahaan 28,9%, dan fraud laporan keuangan 6,7%. Fraud dengan skala besar terjadi di PT Asabri dengan kerugian Negara menurut BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebesar Rp 22,78 triliun, PT Jiwasraya Rp 16,81 triliun, dan terbaru fraud di PT Indosurya Inti Finance yang menurut Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebabkan kerugian nasabah Rp 106 triliun.

Pada awal tahun 2025, sektor *consumer non-cyclicals* di Indonesia menunjukkan kinerja yang beragam. Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) per 21 Februari 2025 mencatat bahwa indeks sektor ini mengalami penurunan sebesar

5,54% secara year-to-date (YtD). Penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat akibat penyusutan kelas menengah, tetapi juga oleh perubahan preferensi konsumen yang kini lebih memilih produk lokal yang lebih terjangkau. Contohnya, Unilever mengalami penurunan pangsa pasar di Indonesia akibat efek boikot dan semakin kuatnya persaingan dengan merek-merek lokal. Selain itu, tekanan nilai tukar rupiah yang melemah turut meningkatkan biaya impor bahan baku, sehingga memperkecil margin keuntungan perusahaan. Untuk menutupi tekanan biaya tersebut, perusahaan sering kali menaikkan harga produk, yang justru bisa memperparah penurunan permintaan terutama di tengah melemahnya daya beli konsumen. Kondisi tekanan finansial seperti ini menciptakan lingkungan yang rawan terjadinya fraud, baik secara disengaja maupun tidak langsung (Soenarso, 2025).

Kasus korupsi yang melibatkan PT Wilmar Cahaya Indonesia bermula dari kebijakan pemerintah pada awal tahun 2022 untuk mengendalikan ekspor minyak sawit mentah (CPO), sebagai respons terhadap krisis kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng di dalam negeri. Dalam kebijakan tersebut, Kementerian Perdagangan memberikan persetujuan ekspor (PE) kepada sejumlah perusahaan, termasuk PT Wilmar, dengan syarat dipenuhinya kewajiban pasokan domestik (*domestic market obligation/DMO*). Namun, dalam praktiknya, ditemukan bahwa PT Wilmar dan beberapa perusahaan lain diduga menyalahgunakan fasilitas ekspor tersebut dengan memanipulasi data dan mengabaikan kewajiban DMO. Dugaan kolusi antara pejabat pemerintah dan pihak swasta pun muncul, hingga Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah tersangka dari kalangan pejabat kementerian dan

pimpinan perusahaan. Pada 4 Januari 2023, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap lima terdakwa, termasuk Komisaris PT Wilmar, Master Parulian Tumanggor, yang dihukum 1,5 tahun penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa (Rizky Suryarandika, 2023). Puncaknya, pada Maret 2025, majelis hakim memutuskan bahwa PT Wilmar Group secara sah terbukti melakukan korupsi, namun dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang memicu kontroversi dan mendorong Kejaksaan Agung untuk mengajukan kasasi. Dalam perkembangan selanjutnya, terungkap dugaan praktik suap sebesar Rp60 miliar untuk mempengaruhi putusan pengadilan, dan Kepala Divisi Legal Wilmar Group ditetapkan sebagai tersangka (CNN Indonesia, 2025). Pada Selasa, 17 Juni 2025, Kejaksaan Agung menyita Rp 11,88 triliun dari lima korporasi dalam Wilmar Group yang terlibat dalam kasus korupsi ekspor *Crude Palm Oil (CPO)*. Penyitaan dilakukan setelah korporasi tersebut mengembalikan kerugian negara atas tindakan korupsi yang dilakukannya.

Kecurangan dalam pelaporan keuangan dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, sehingga pendeteksian kecurangan menjadi semakin penting untuk mencegah kecurangan dalam laporan keuangan. Dengan munculnya konsep *Fraud Hexagon*, perspektif baru dalam memahami faktor-faktor pemicu kecurangan semakin berkembang. Teori Fraud Hexagon yang dikembangkan oleh Georgios L. Voutsinas pada tahun 2019 menambahkan elemen baru dalam mendeteksi kecurangan, yaitu kolusi, sehingga lebih komprehensif dibandingkan teori sebelumnya seperti *Fraud Triangle*, *Fraud Diamond*, dan *Fraud Pentagon*. Dalam penelitian ini, berbagai proksi digunakan untuk mengukur enam elemen dalam

Fraud Hexagon guna memperkuat analisis terhadap potensi kecurangan dalam laporan keuangan.

Pressure (Tekanan) muncul ketika kondisi keuangan perusahaan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga memberikan tekanan bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan agar tetap terlihat baik di mata investor dan pemegang saham.. *Opportunity* (Kesempatan) terjadi ketika pengawasan internal yang lemah atau tidak efektif memberikan peluang lebih besar bagi individu dalam perusahaan untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. *Rationalization* (Rasionalisasi) dapat terlihat dari pergantian auditor, yang mengindikasikan bahwa manajemen mungkin mencari auditor yang lebih fleksibel atau ingin menghindari deteksi terhadap laporan keuangan yang tidak wajar.

Capability (Kapabilitas) tercermin dalam pergantian direksi, yang dapat menunjukkan adanya individu dengan kemampuan lebih besar dalam melakukan manipulasi keuangan serta menutupi jejak kecurangan. *Ego/Arrogance* (Ego/Keangkuhan) mencerminkan sifat egois atau rasa superioritas seorang pemimpin perusahaan, yang dapat mendorongnya untuk bertindak di luar batas aturan. *Collusion* (Kolusi) terjadi ketika hubungan politik memberikan hak istimewa kepada perusahaan, yang memungkinkan manajemen memanfaatkan atau menyalahgunakan koneksi politik untuk kepentingan pribadi, termasuk manipulasi laporan keuangan. Dengan mempertimbangkan keenam faktor ini, teori *Fraud Hexagon* menawarkan pendekatan yang lebih lengkap dalam mendeteksi dan menganalisis kecurangan dalam laporan keuangan dibandingkan teori-teori sebelumnya.

Penelitian mengenai kecurangan laporan keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Sagala, S. G., & Siagian, V (2021) meneliti perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016–2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan yang diukur melalui *financial target* dan *financial stability* memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sementara itu, variabel lain seperti *change in director*, *ineffective monitoring*, *change in auditor*, *frequent number of CEO's picture*, *cooperation with government project*, *politic connection*, serta status sebagai perusahaan milik negara tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Khusnul & Shinta (2025) dengan menggunakan pendekatan fraud hexagon pada perusahaan *non-cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023. Hasil penelitian ini menemukan bahwa *financial stability* dan *nature of industry* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, variabel lain seperti *financial target*, *external pressure*, *personal financial need*, *ineffective monitoring*, *change in director*, *change in auditor*, *frequent number of CEO's picture*, dan *cooperation with government project* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh William dan Denny (2025) mengenai perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019–2023 dengan pendekatan *fraud hexagon* menunjukkan bahwa *financial stability*, *change in director*, *ineffective monitoring*, *change in auditor*, dan *frequent number of CEO's*

picture berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, *political connection* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kecurangan laporan keuangan telah menjadi isu global yang berdampak luas terhadap pemegang saham, investor, dan stabilitas ekonomi. Untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, penerapan teori *fraud hexagon* memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan teori-teori sebelumnya seperti *fraud triangle* dan *fraud diamond*. Dengan memahami faktor-faktor penyebab kecurangan yang ada di dalam *fraud hexagon* serta menerapkan sistem pengawasan yang kuat, perusahaan dapat meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis menyimpulkan judul penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut **“Analisis Pengaruh *Fraud Hexagon* Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor Barang *Non - Cyclicals* Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020 -2024”** diharapkan akan membuat pengguna laporan keuangan berhati-hati dalam menganalisis dan menggunakan laporan keuangan yang tersedia dan manajemen perusahaan untuk lebih meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *financial stability* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah *ineffective monitoring* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?

3. Apakah *change in director* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan ?
4. Apakah *change in auditor* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
5. Apakah *frequent number of CEO's picture* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan ?
6. Apakah *politic connection* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh fraud hexagon dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan . Deteksi diproksikan dengan berbagai variabel yaitu : *financial stabillity* , *ineffective monitoring*, *change in director*, *change in auditor*, *frequent number of CEO's picture* dan *politic connection* pada perusahaan consumer *non – cyclical*s yang terdaftar di BEI pada tahun 2020 – 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah *financial statement fraud* serta meningkatkan transparansi laporan keuangan. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan. Selain itu, regulator dan otoritas keuangan dapat menggunakan temuan ini untuk memperketat regulasi dan

pengawasan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam mengembangkan studi lebih lanjut terkait pencegahan kecurangan dalam laporan keuangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan wawasan bagi investor, auditor, regulator, dan manajemen perusahaan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu kecurangan laporan keuangan. Dengan memahami pengaruh elemen-elemen fraud hexagon, pemangku kepentingan dapat mengembangkan strategi mitigasi risiko yang lebih efektif guna meningkatkan transparansi dan integritas pelaporan keuangan di perusahaan *consumer non-cyclicals*.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I: Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Membahas teori-teori terkait Fraud Hexagon, kecurangan laporan keuangan, serta penelitian terdahulu yang relevan dan hipotesis penelitian.

BAB III: Metodologi Penelitian

Menguraikan desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menyajikan temuan penelitian dan analisis terhadap hasil yang diperoleh, serta pembahasan mendalam terkait temuan tersebut.

BAB V: Penutup

Menampilkan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya atau implikasi praktis bagi perusahaan dan regulator. jelaskan dalam bentuk paragraf per babnya

